

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Beberapa ringkasan penelitian terdahulu terkait tema yang serupa sebagai berikut. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan dibawah ini, sekurang-kurangnya telah menggambarkan tema dinamika partai politik dalam faksionalisasi. Dua kajian berbeda di Italia dan Nigeria menggambarkan pola faksionalisasi partai politik. Hasil penelitian Andrea Ceron (2011) *“Intra-party Politicsc and Party System Factional Conflict, Cooperation and Fission within Italian Parties.* Hasil penelitian ini menggambarkan tentang model alokasi sumberdaya partai politik sebagai preferensi utama dalam menyeimbangkan partai dari sering menyatu atau justru mengalami perpecahan.

Sedangkan implikasi perpecahan yang ditimbulkannya oleh partai politik diteliti oleh Momodu Jude dan Matudi Gambo Ika (2013) *The Implications of Intra-Party Conflicts on Nigeria’s Democratisation.* Hasil penelitian ini menyebutkan implikasi dari konflik intra partai yang memperburuk dinamika demokrasi di Nigeria. Akibat yang ditimbulkan antara lain pada kegagalan institusionalisasi partai politik dan demokratisasi.

Di Indonesia beberapa kajian tentang dinamika faksionalisasi partai dan konflik internal dapat dilihat pada sejumlah hasil penelitian terdahulu. Kajian Penelitian berkaitan dengan konflik faksi pada internal partai lainnya diuraikan oleh Firman Noor (2012), *Institutionalising Islamic Political Parties in*

*Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)*". Hasil penelitian ini menjelaskan tentang fragmentasi dan kohesi pada PKB dan PKS secara nasional. Namun kajian ini masih kurang menyentuh varian lain dalam dinamika lokal sehingga luput dalam mengembangkan sebuah gagasan tentang dinamika politik lokal. Hasil penelitian ini sebenarnya membantu PKB dan PKS pola manajemen internal partai.

Sarannya berisi tentang upaya yang dapat mengurangi fragmentasi dan memperkuat kohesifitas melalui ukuran institusional partai politik. Peneliti lainnya Arief Munandar memfokuskan kajiannya pada Partai Keadilan Sejahtera. Hasil Kajiannya "*Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*" ini disimpulkan bahwa PKS merupakan partai politik yang faksionalisasi lebih dinamis.

Berkaitan dengan faksionalisasi dan terbentuknya partai-partai baru dari hasil perpecahannya internal, Andreas Ufen (2007) dalam penelitian tentang "*Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, The Philipines, and Thailand*" bahwa Indonesia mengalami perpecahan internal partai. Perpecahan itu diikuti dengan lahirnya partai politik yang baru dalam pola persaingan partai yang lebih teratur. Masalah lainnya diteliti oleh Paige Johnson Tan, 2012, *Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia*. Penelitian ini pada dasarnya mengevaluasi 14 tahun kiprah partai politik era reformasi. Beberapa fakta ditemukan tentang lemahnya sumber daya dalam

kontribusi terhadap struktur organisasi partai, perilaku personalistik yang mengekang struktur partai dalam mobilisasi pemilu, dan kegagalan institusionalisasi yang ditandai oleh perpecahan faksi organisasi partai.

Demikian pula Mark R. Woodward, 2008, dalam penelitiannya *“Indonesia's Religious Political Parties: Democratic Consolidation and Security in Post-New Order Indonesia”*, memaparkan dinamika institusionalisasi partai politik aliran Tradisional (abangan atau kejawen) dan modernis. Kaum tradisionalis menolak gagasan-gagasan partai politik Islam modern karena dianggap telah melarang kebiasaan praktik keagamaan tradisional kaum abangan.

Kikue Hamayotsu, 2011, *“The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy”*, menggambarkan munculnya Partai Keadilan Sejahtera bercirikan model penguatan kelembagaan partai dengan merekrut pemuda Muslim terdidik, realisasi syariah, kampanye pemilu yang efektif, dan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Mada Sukmajati, 2011, *How Islamic Parties Organize at The Local Level In Post-Suharto Indonesia: an Empirical Study of Six Major Islamic Parties in The Tasikmalaya District, West Java Province*, menggambarkan dua temuan utama yaitu aktor politik Islam yang mengatur partai-partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa partai-partai ini mengandung beberapa unsur partai berbasis elite, partai berbasis massa, partai electoralist, dan model kartel. Dalam proses institusionalisasinya

mengalami proses hibridasi ideologis. Sukmajati menemukan keunikan siklus partai berbasis elit, berbasis massa, partai electoralist ke tahap partai kartel.

Uraian hasil penelitian terdahulu telah dipaparkan. Tentu saja pemaparannya untuk membandingkan dan membedakan posisi penelitian ini dengan mengajukan tiga permasalahan mendasar yaitu (1) mengapa terjadinya faksionalisasi yang melahirkan perpecahan pada internal PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; keterlibatan aktor dan lembaga; serta implikasi faksionalisasi yang ditimbulkannya terhadap keberlangsungan partai di daerah.

**Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kasil Kajian	Keterangan
1.	Firman Noor, Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)"	Tulisan ini menjelaskan Fragmentasi dan kohesi Pada PKB dan PKS institusionalisasi organisasi partai politik termasuk pada aspek non-institusional partai seperti peran individu dalam membentuk situasi nyata dalam meskipun hanya sebagai pelengkap, serta prosedural dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas mekanisme internal kelanjutan kaderisasi sistematis dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama sehingga melestarikan dan memperkuat kohesi	Tulisan dalam bentuk Disertasi Tahun 2012
2.	Andrea Ceron, "Intra- Politics and Party System Factional Conflict, Cooperation and	Tulisan ini menjelaskan tentang preferensi faksi dan dinamika intra-partai politik di Italia dimana Preferensi Faksi partai sebagai penyeimbang internal partai dalam pengaturan dan	Tulisan ini dalam bentuk Disertasi Ditulis tahun 2011

	Fission Italian Parties.	pengalokasi-an sumber daya secara proporsional sesama kekuatan faksi yang sering menyatu mengalami konflik perpecah-an intra-partai	
3.	Arief Munandar, "Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004"	Tulisan menjelaskan ini menghasilkan beberapa temuan antara lain bahwa PKS sebagai partai kader berbasis Gerakan keagamaan yang memiliki "faksionalisasi dinamis" yang relatif cair, lentur, dan tidak bersifat mutually exclusive karena kepemimpinan puncak di Dewan Pimpinan Pusat PKS diatur dan diorganisasikan oleh elite partai yang jauh lebih efektif dan efisien	Tulisan ini dalam bentuk Disertasi ditulis Tahun 2011
4.	Andreas Ufen, Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand	Tulisan menggambarkan tentang komparasi institusionalisasi partai politik di Indonesia, Filipina dan Thailand dimana dinamika di Indonesia tentang pola persaingan partai lebih teratur, persaingan antar faksi-faksi partai memunculkan kelompok baru	Tulisan ini ditulis dalam bentuk Jurnal ditulis Tahun 2007
5.	Jude Matudi Gambo Ika, The Implications of Intra-Party Conflicts on Nigeria's Democratisation	Tulisan ini menggambarkan tentang berbagai faktor-faktor penyebab munculnya perpecahan dan konflik internal partai di Nigeria yang berakibat fatal pada kegagalan institusionalisasi partai politik dan demokratisasi	Tulisan ini dalam bentuk Jurnal diterbitkan tahun 2013
6.	Paige Johnson Tan, Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia	Tulisan ini sebenarnya mengevaluasi 14 tahun kiprah partai politik era reformasi dengan menggambarkan tentang lemahnya sumber daya dalam kontribusi terhadap struktur organisasi partai politik di Indonesia. Tan	Tulisan ini dalam bentuk Jurnal diterbitkan tahun 2012

		berpendapat bahwa organisasi partai politik lebih bersifat personalistik sehingga mengekang struktur partai dalam mobilisasi pemilu. Kegagalan institusionalisasi juga dapat dilihat pada perpecahan faksi organisasi partai	
7.	Mark R. Woodward, Indonesia's Religious Political Parties: Democratic Consolidation and Security in Post-New Order Indonesia	Tulisan menggambarkan tentang konsolidasi partai politik Islam di Indonesia dengan program partai dengan label nilai-nilai moral, keadilan sosial, pendidikan, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah sistem perbankan syariah, pelaksanaan syariat Islam, wacana pembentukan negara Islam. Tulisan ini juga memaparkan Dinamika institusionalisasi partai Islam Tradisional (abangan atau kejawen) dan modernis. Kaum tradisionalis menolak gagasan-gagasan partai politik Islam modern yang melarang kebiasaan praktik keagamaan tradisional.	Tulisan ini dalam bentuk Jurnal diterbitkan tahun 2008
8.	Kikue Hamayotsu, 2011, "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of islamist Mobilization in a Muslim Democracy",	Tulisan ini menggambarkan munculnya Partai Keadilan Sejahtera yang berawal dari Gerakan dakwah kampus dan tarbiyah dalam transisi demokrasi. Penguatan kelembagaan PKS dengan merekrut pemuda Muslim terdidik, ke dalam struktur partai yang dilembagakan melalui pengakaran di masyarakat, realisasi syariah. Jaringan komunitas dibangun secara teratur dengan masyarakat sekitarnya sebagai modal sosial dan politik dalam kampanye pemilu yang efektif.	Tulisan ini dalam bentuk Jurnal diterbitkan tahun 2011

		Tema-tema tentang pelayanan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan ekonomi-politik PKS dalam gerakan dakwahnya	
	Mada Sukmajati, How Islamic Parties Organize at The Local Level In Post-Suharto Indonesia: an Empirical Study of Six Major Islamic Parties in The Tasikmalaya District, West Java Province.	Hasil penelitian ini menggambarkan tentang dua temuan utama yaitu aktor politik Islam yang mengatur partai-partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa partai-partai ini mengandung beberapa unsur partai berbasis elit, partai berbasis massa, partai electoralist, dan pihak model kartel. Dalam proses institusionalisasi-nya mengalami proses hybridasi ideology. Mada Sukmajati menemukan keunikan siklus partai berbasis elit, berbasis massa, partai electoralist ke tahap partai kartel.	Tulisan ini dalam bentuk Desertasi tahun 2011
10.	Aji Deni, Faksionalisasi Partai-Partai Politik di Maluku Utara (Studi Kasus Terhadap PPP, PAN dan PKS)	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian lebih ini lebih memfokuskan Tentang Faksionalisasi intra partai politik dan dampaknya terhadap partai-partai politik Islam di Maluku Utara Sejak 2014-2019. Penelitian ini mengajukan 3 hal mendasar yakni mengetahui penyebab faksionalisasi, keterlibatan aktor dan lembaga serta dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan partai politik Islam di Maluku Utara. Menggunakan Dua Teori utama tentang Faksionalisme yaitu Francoise Boucek (2012) tentang 4 Faktor Penyebab Faksionalisme dan Bettcher (2005) tentang tingkat Pengorganisasian Faksi Partai. Penelitian ini menemukan	Hasil Penelitian 2020 penelitian tahun 2018

		<p>beberapa fakta yang berbeda dengan indikator Boucek, bahwa ternyata faksionalisasi dapat terjadi tidak hanya ketika partai itu semakin sukses/berhasil melainkan juga ketika partai alami kegagalan dalam pemilu seperti PPP dan PAN. Persaingan internal sebagai faktor dominan yang memicu munculnya factor lainnya seperti Perebutan posisi kunci partai, heterogenitas ideologi dan motivasi kesejahteraan. Sedangkan temuan lainnya, Beberapa indikator tingkat pengorganisasian faksi Bettcher bertentangan dengan hasil temuan karena tipe faksi klientelisme dan patronase justru jauh lebih solid dan kuat karena yang dapat ditemukan pada faksi pragmatis AGK dan BK. Varian baru dalam penyebab Faksionalisme bahwa Tindakan Pragmatisme diboncengi kepentingan etnis terhadap persaingan internal partai menyebabkan terbentuknya faksi-faksi yang diikuti oleh perebutan posisi kunci di tengah kegagalan partai dalam pemilu, dominasi etnis, persaingan internal keluarga /marga yang tidak berimbang, dan heterogenitas ieologi yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan menurunnya pengaruh partai berbasis Islam di parlemen dan kolektivisme nilai ideologi keummatan. Perbaikan terhadap dampak buruk hanya dapat dilakukan melalui Manajemen Intra-Partai dan Demokratisasi Intra-Partai</p>	
--	--	---	--



Penelitian menggunakan 3 rumusan masalah tentang (1) penyebab faksionalisasi, keterlibatan aktor dan lembaga serta dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan partai politik Islam di Maluku Utara. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah bahwa rumusan masalah ini melihat secara utuh tentang mengapa terjadinya faksionalisme. Sedangkan pada penelitian terdahulu belum menghadirkan gambaran yang utuh tentang penyebab terjadinya faksionalisme di level lokal dengan latar belakang aktor-aktor faksi yang terlibat berbasis etnis, dinastik dan pemodal.

Misalnya pada penelitian terdahulu, Noor (2012) hanya menggunakan dua pendekatan tentang fragmentasi PKB dan kohesivitas PKS, menggambarkan sedikit tentang terbentuknya konflik dan kohesi internal partai, namun tidak secara tegas menggambarkan faktor-faktor penyebab faksionalisme. Demikian pula (Ceron, 2011), meskipun menawarkan preferensi faksi partai sebagai solusi tentang penyeimbang internal partai dalam pengaturan dan pengalokasian sumber daya secara proporsional antar kekuatan faksi, namun solusi ini belum mampu menjawab terhadap berbagai kasus faksi partai yang terbatas alokasi sumberdaya partai.

Penelitian lainnya (Munandar, 2011) mengklaim sisi keberhasilan kepemimpinan PKS yang lebih lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan model faksi yang dinamis, relatif cair, lentur, dan tidak bersifat mutually exclusive. Namun hasil penelitian ini tidak mampu menjawab fenomena baru tentang pecahnya internal PKS pada tahun 2018 melalui Garbi dan dipertegas lagi dengan lahirnya Gelora, partai bentukan Fahri

Hamzah dan Anis Matta, eks Presiden DPP PKS.

Hasil penelitian lainnya (Hamayotsu, 2011) terungkap keberhasilan PKS dan trend positif dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat dalam kekuatan ekonomi-politik Muslim terdidik. Temuan ini tidak mampu menjawab kegagalan PKS mempertahankan citra positif karena diterpa kasus korupsi impor sapi yang menimpa Presiden DPP PKS, dan model praktek kleintelistik dan patronase berbasis etnis elite PKS di level lokal.

Inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut dengan munculnya fenomena baru tentang faksionalisme partai politik telah melemahkan beberapa hasil temuan sebelumnya. Artinya beberapa hasil temuan terdahulu memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan memprediksi fenomena yang akan terjadi. Kemampuannya sangat terbatas dan hanya mampu mengungkapkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya, namun belum bisa dijadikan sandaran teoritik terhadap fenomena baru terutama model faksionalisme di ranah lokal.

Penjelasan tentang sisi kelemahan dan kekurangan penelitian terdahulu di atas, idealnya membutuhkan keberlanjutan dan perbaikan teoritik dalam rumusan masalah penelitian ini tentang penyebab faksionalisme, aktor yang terlibat, dampak yang ditimbulkannya dan keberlanjutan partai di di level lokal. Rumusan masalah ini sebenarnya secara implisit membantah hasil-hasil temuan sebelumnya seperti asumsi Noor yang sangat terbatas hanya pada fragmentasi dan kohesivitas; atau Ceron (2011) hanya menjelaskan alokasi sumberdaya partai yang berimbang sesama faksi, namun tidak bisa dijadikan sandaran teoritik pada fenomena faksionalisme partai yang

memiliki keterbatasan sumberdaya ekonomi. Demikian pula hasil penelitian (Munandar, 2011) hanya mengungkapkan kesuksesan terdahulu tentang faksionalisme dinamis, namun gagal dijadikan sandaran teoritik tentang faksionalisme PKS, perpecahan dan fenomena faksi kooperatif semu yang berlaku di level lokal. Bahkan hasil penelitian ini tentang faksi yang cair, lentur, dan tidak bersifat *mutually exclusive*, berbeda dengan berbagai fenomena di level lokal dengan rivalitas internal elite PKS yang terjadi. Demikian pula hasil penelitian (Hamayotsu, 2011) memiliki kelemahan karena bersifat parsial dalam memandang dinamika ekonomi politik PKS namun gagal mengungkapkan praktek ekonomi-politik dari bentuk keluarga, klientelistik dan patronase dan sangat pragmatis praktek elite PKS dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan di ranah lokal.

*Pertama*, Berdasarkan kelemahan dan kekurangan hasil-hasil penelitian terdahulu, kompleksitas faksionalisme partai Islam ini mendorong penulis lebih cenderung memilih teori Francoise Boucek (2012) tentang 4 Faktor Penyebab Faksionalisme dan Bettcher (2005) tentang model pengorganisasian dan motivasi faksi, serta dampak faksi dalam rute yang ditempuh (Boucek, 2009) yaitu model faksi kooperatif, kompetitif dan degenerative, sebagai rujukan teori awal dalam menganalisis kasus faksionalisme Partai Islam (PPP, PAN dan PKS) di Maluku Utara. Pilihan teori ini jauh lebih logis dan mendekati fenomena heterogenitas aktor partai berdasarkan agama, etnis, profesi dan dan model faksi. Selain itu, Penelitian ini juga menggambarkan dampak faksionalisme yang ditimbulkan dalam keberlanjutan faksi yang digerakan oleh aktor politik

berbasis etnis dominan. Penelitian terdahulu tidak menggambarkan tentang prediksi dampak faksionalisme dan keberlangsungannya suatu faksi dan partai politik. Penelitian ini berusaha mengisi dan memperbaiki celah dan kelemahan penelitian terdahulu dengan mengungkapkan beberapa analisis data tentang model faksi, pemilu dan rute faksi untuk dapat memprediksi keberlanjutan partai politik Islam di masa yang akan datang.

*Kedua*, penelitian ini tetap terbuka mengkritisi beberapa indikator teori Boucek (2009 & 2012) dan Bettcher (2005) yang memiliki kelemahan. Misalnya jika dibandingkan dengan indikator (Boucek, 2012) terdahulu, bahwa ternyata faksionalisasi dapat terjadi tidak hanya ketika partai itu semakin sukses/berhasil melainkan juga ketika partai alami kegagalan dalam pemilu seperti PPP dan PAN. Persaingan internal sebagai faktor dominan yang memicu munculnya faktor lainnya seperti Perebutan posisi kunci partai, heterogenitas ideologi dan motivasi kesejahteraan. Sedangkan temuan lainnya, Beberapa indikator tingkat pengorganisasian faksi Bettcher bertentangan dengan hasil temuan karena tipe faksi klientelisme dan patronase justru jauh lebih solid dan kuat seperti pada fenomena faksi pragmatis AGK dan BK. Bahkan munculnya varian baru yang lebih bersifat lokal sebagai fenomena baru faksi di internal partai politik Islam yang telah membantah hasil-hasil penelitian terdahulu maupun dapat menyanggah beberapa indikator Boucek tentang faksi keluarga yang klientelistik dan mengandalkan patronase pada kader PKS yang dianggap partai berkarakter Islam terdidik.

*Ketiga*, belum ada hasil kajian tentang penyebab

faksionalisme dengan tindakan pragmatisme dan diboncengi kepentingan etnis yang heterogen terhadap persaingan internal partai Islam di ranah lokal. Hal ini sangat menarik bagi penulis dalam mengungkapkan akar permasalahan yang sebenarnya tentang penyebab faksionalisme yang berbeda dengan indikator teori Boucek dan Bettcher yang digunakan penulis. Bukan hanya pada perbedaan urutan faktor penyebab, model aktor yang lebih lokal, serta dampak bagi keberlanjutan partai, namun juga berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan terhadap teori sebelumnya yang lebih memfokuskan kajian pada faksionalisme partai-partai dominan. Sedangkan kajian ini lebih dititikberatkan pada kepada partai Islam yang kurang dominan diranah lokal, termasuk pergeseran dari kesuksesan ke kegagalan partai atau sebaliknya dari kegagalan ke kesuksesan partai dapat dipandang sebagai pembeda dengan teori Boucek sebelumnya yang hanya melihat kesuksesan partai sebagai pemicu persaingan internal yang melahirkan terbentuknya faksi.

*Keempat,* Penelitian terbaru ini sebenarnya mengungkapkan bahwa penyebab faksionalisme tidak serta merta timbul bersamaan, tetapi membutuhkan suatu kondisi lokal khas. Ketika partai politik berada di ranah lokal, maka tidak menutup kemungkinan faksi yang bertikai akan mudah diintervensi oleh kekuatan memaksa dari pimpinan pusat sebagai pengendali tertinggi dalam struktur partai. Faktor lain adalah faksionalisme dilatarbelakangi oleh heterogenitas etnik yang berpotensi melahirkan konflik perpecahan. Jika merujuk ke penelitian terdahulu (Ceron, 2011) bahwa konflik perpecahan ini semakin meruncing ketika dalam pengelolaan sumberdaya partai,

distribusinya tidak merata dan hanya dikendalikan oleh faksi dominan. Sedangkan dalam penelitian terbaru, penulis melihat pada faksi yang timbul dari terbatasnya sumberdaya ekonomi politik pada PPP, hanya dimiliki faksi pengusaha pada PAN, hanya dimiliki faksi keluarga Kasuba pada PKS. Demikian pula perebutan posisi kunci di tengah kegagalan partai dalam pemilu juga berbeda dengan teori terdahulu. Bahkan, kehadiran kelompok politik yang dominasi preferensi etnis dalam kepentingan faksi juga menampilkan beberapa fenomena baru tentang persaingan internal keluarga maupun antar keluarga yang tidak berimbang. Penelitian ini juga menggambarkan menurunnya pengaruh partai berbasis Islam di parlemen dan kolektivisme nilai ideologi keummatan.

## **2.2 Konsep Partai Politik**

Pada awal kelahirannya partai politik sebenarnya sebagai organisasi resmi yang menjadi peserta pemilu dalam rangka mengejar posisi otoritas dalam sistem pemerintahan, bahkan bertujuan mengamankan dan meraih kekuasaan. Pandangan klasik Edmund Burke (1770) mendefenisi partai adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati. Demikian pula Anthony Downs (1975) memahami partai politik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah (Katz dan Crotty, 2014: 4).

V.O Key Jr. (1964) dalam konteks politik Amerika memahami partai politik sebagai kelompok khusus dalam kumpulan pemilih secara keseluruhan, kelompok terbentuk dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai anggota Partai. Partai mengacu pada kelompok pekerja profesional yang termasuk salah satu dari partai dalam pemilih, kelompok, partai di legislatif, dan partai di pemerintah. Seluruh jenis kelompok yang disebut partai berinteraksi secara erat dan kadang-kadang mungkin sebagai satu jenis. Makna profesional sebagai istilah partai yang sering mengacu pada beberapa jenis kelompok (Katz dan Crotty, *ibid*, 2014: 4).

William Nisbet Chambers (1967) mendefinisikan partai politik dalam arti modern dapat dianggap sebagai informasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan menunjukkan suatu struktur atau organisasi yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantong-kantong lokal, dan perspektif simbol identifikasi kelompok (Katz dan Crotty, *ibid*, 2014: 5).

Definisi lainnya diuraikan oleh Leon D. Epstein (1980) bahwa partai politik adalah kelompok, meskipun terorganisasi secara longgar, yang berusaha untuk memilih pemegang jabatan pemerintah dengan nama tertentu. Joseph Schlesinger (1991) partai politik adalah kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan jabatan jabatan publik. John Aldrich (1995) menjelaskan partai politik dapat dilihat sebagai kondisi elite

untuk merebut dan menggunakan jabatan politik tapi partai politik lebih dari merebut (Katz dan Crotty, *ibid*, 2014: 4).

Partai politik adalah politik terlembaga yang telah mengadopsi aturan, norma, dan prosedur (Hague: 2000: 131). Lapalombara dan Anderson juga menyepakati hal tersebut bahwa partai memiliki kelompok dan anggota yang bertindak dalam perebutan dan pertarungan untuk meraih kekuasaan. Sebagai kekuatan artikulatif, Sigmund Neumann menunjukkan sisi lain dari partai politik sebagai yaitu mengartilukasikan aspirasi masyarakat dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda (Lapalombara and Anderson, 2002: 394).

Beberapa Teoritikus lainnya Schattschneider (Sartori, 1976: 59), Kaplan dan Lasswell (Sartori, *ibid*: 60) pada intinya menggambarkan partai politik sebagai organisasi terkemuka yang mengejar dan meraih kekuasaan melalui nominasi kandidat perwakilan di posisi pemerintahan maupun memformulasikan isu-isu secara komprehensif. Partai politik dalam beberapa makna yang bervariasi. Pertama, partai politik adalah organisasi sosial yang hadir untuk memengaruhi (1) pemilu untuk meloloskan kandidatnya dalam keanggotaan pemerintahan melalui penempatan secara langsung para kandidat melalui lembaga secara selektif, (2) kebijakan pemerintah berdasarkan beberapa prinsip untuk mencapai kesepakatan mayoritas anggota. Kedua, partai didefinisikan dalam istilah aktor, aksi (tindakan), konsekwensi (tujuan), dan ranah. Partai didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara eksklusif terhadap fungsi mereka,



struktur maupun keduanya. Ketiga, partai politik adalah kelompok politik yang diidentifikasi melalui label lembaga yang hadir di setiap pemilu, dan mampu menempatkan dirinya dalam pemilu (bebas maupun tertutup) para kandidatnya terhadap lembaga publik (Sartori, Ibid: 61).

Dari berbagai ruang lingkup, definisi dan tujuan partai politik yang digambarkan oleh beberapa ahli, dapat dijelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan meraih kekuasaan dan fungsi kontrol dalam mengendalikan maupun memengaruhi kebijakan pemerintah. Tentu saja secara struktural, partai memiliki fungsi-fungsi kelembagaan, kelompok faksi yang memberi warna dinamika internal partai. Partai politik bukanlah sebuah struktur yang monolitik melainkan koalisi berbagai individu dan kelompok sub-partai dengan keragaman sikap, kepentingan dan ambisi. Hal ini akan menciptakan tekanan yang kompetitif dan saling bertentangan di dalam partai yang dapat memicu pembentukan dan penguatan faksi internal.

### **2.2.1 Tipologi Partai Politik**

Tipologi partai berdasarkan akar sejarah dinamika politik di dunia. Scarrow menggambarkan dinamika partai politik meliputi Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat dengan topik peranan partai politik dalam sistem politik, partai politik dalam parlemen, sistem kepartaian dan organisasi partai dan kandidatnya (Scarrow, 2002: 2). Sumber lainnya juga menguraikan akar terbentuknya partai politik berdasarkan dinamika sosial-politik dari peralihan kekaisaran, kerajaan dan

politik tradisional berubah ke arah yang lebih modern dan liberal (Hague, Op.Cit: 135).

Terbentuknya partai politik diawali dari pentahapan struktur sosial yaitu keberadaan partai dipengaruhi oleh model konstruksi orisinal revolusi sosial suatu bangsa dan negara (*nation-state*). Pertama, dinamika partai yang dilatarbelakangi kelahirannya berdasarkan pengaruh revolusi industri di Eropa, dimana struktur sosial partai merepresentasikan kepentingan kelas-kelas sosial dalam industri, melayani hak-hak para pekerja buruh maupun pemodal (Hague, Ibid. : 252).

Dalam menjelaskan asal-usul partai politik, dapat dibedakan antara aktor partai berbasis kader dan aktor partai berbasis massa. Partai berbasis massa lebih terbuka dan besar dengan beranggotakan sekumpulan kelompok sosial kelas pekerja/buruh yang secara aktif dalam memenangkan pemilihan legislatif. Sebaliknya aktor partai berbasis kader lebih elitis dan tertutup, terbatas di kalangan tertentu, terbentuk dalam karakter partai berhaluan konservatif seperti Partai Konservatif di Inggris, Kanada, Skandinavia, dan di Amerika Serikat pada masa awal terbentuknya partai politik, yaitu Partai Federalis dan Partai Jeffersonian. Partai kader sering disebut sebagai partai kausus yang ditandai oleh model terbatasnya dan tertutupnya dalam pengambilan keputusan internal. Partai berbasis massa dilatarbelakangi oleh parlemen jalanan di mana kelompok sosialnya mengejar representasi sebagai sebuah cara untuk mendapatkan kebijakan yang objektif partai bekerja Partai Sosialis kelas pekerja berkembang sepanjang Eropa Timur pada abad ke-20 (Hague, Ibid.: 252-253).

Dalam perkembangannya kedua tipe ini berevolusi membentuk pola yang baru yang dikenal dengan partai Catch-All (mengendalikan seluruh kepentingan politik) yang ditandai oleh respon terhadap sistem politik dan komunikasi melalui media massa dan keanggotaan partai. Pola “*Catch-All*” lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada representasi kelompok sosial. Partai catch all adalah partai yang tidak lagi sesuai dengan program-program ideologis partai awalnya karena lebih mengambil peranan di dalam pemerintahan daripada mencerminkan representasi ideologi partai. Selanjutnya, sistem kepartaian dimaknai sebagai keseluruhan konfigurasi partai politik yang berdasarkan pada jumlah, kepentingan relatif, interaksi sesamanya, serta undang-undang pemilu yang mengatur sistem kepartaian. Sistem kepartaian menguraikan tentang struktur, dana, model kampanye, pola kepemimpinan, model komunikasi intra maupun antar partai yang dapat berdampak terhadap suatu pemerintahan yang dikendalikan (Hague. Ibid.: 253-254).

Duverger menemukan beberapa pola hubungan antara sistem partai politik dengan model pemilu. Sistem pemilu *single-member plurality* hanya ditemukan pada partai politik yang menganut sistem dua partai. Sedangkan model Pemilu Two Round System dan PR (Proportional Representative) diterapkan pada sistem kepartaian majemuk (Hague, Ibid. : 254).

Salah satu pemikir dan aktivis partai di Italia, Robert Michels (1911) pesimis bahwa elite partai politik akan lebih demokratis. Hal ini didasarkan pada asumsinya bahwa organisasi partai yang sangat demokratis pun akan tetap didominasi oleh klik yang

mengendalikan partai yaitu para pimpinan partai politik yang didukung oleh pengurus internal. Michels melihat pimpinan partai memiliki kemampuan dalam mengembangkan skill organisasi berpengetahuan yang baik dan memiliki kepentingan dalam keberlanjutan kekuasaan. Dengan fakta ini, Michels pesimis berlakunya demokrasi dalam organisasi partai politik yang kemudian dikenal dengan istilah *The Iron and law of oligarchy*. Artinya, organisasi partai itu lebih cenderung kepada model oligarkis (Hague, Ibid.:258).

*Kedua*, revolusi post-industrial, dimana partai politik yang lahir sebagai bentuk antitesa terhadap fase industri. Contohnya, *Green Party* yang menekankan pada aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup, anti nuklir dan berbagai bentuk lainnya. *Ketiga*, Partai-partai politik yang lahir di Indonesia selalu diilhami oleh bentuk pentahapan revolusi kemerdekaan sehingga melahirkan ideologi yang kental dengan semangat aktor yang beraliran ideologi nasionalis, sosialis dan Agama.

Duverger menyebut dinamika ekstra parlemen yang dilakukan oleh kelompok elite maupun massa yang disebut sebagai cikal bakal embrio partai politik (Duverger, 155: xxx). Tipologi partai politik dibedakan dalam lima basis partai yaitu berbasis elit, partai berbasis massa, partai berbasis lokal etnis, dan partai elektoral dan gerakan. Model lain adalah (1) tipe partai berdasarkan model pengorganisasiannya yang melahirkan tipologi partai besar/kecil, berdasarkan pada elit/massa; (2) partai yang berorientasi program yang melahirkan tipologi berorientasi ideologis dan klien-partikularistik; dan (3) toleransi dan pluralistik

atau demokratis versus hegemonik yang cenderung anti- system (Richard Gunther and Larry Diamond, 2003: 167-199).

### **2.2.2 Tipologi Partai Politik di Indonesia**

Dinamika kepartaian di Indonesia tidak terlepas dari akar sejarah politik yang mengalami transisi dari zaman kolonialisme ke zaman kemerdekaan. Hal itu digambarkan oleh Denny menjelaskan perbedaan dalam menggeneralisir tipologi Duverger bagi ideologi politik di Indonesia. Meminjam tipologi politik aliran ala Feith, Denny menilai bahwa struktur basis ideologi partai di Indonesia lebih bercorak politik aliran sebagai bentukan budaya kolonial. Polarisasi struktur keanggotaannya tidak berdasarkan pada konservatisme (kelas atas—upper class), liberalisme (kelas menengah—middle class), dan sosialisme (kelas pekerja—working class), melainkan lebih mengarah tipologi Geertz pada kultur santri (muslim modernis maupun tradisional), priyayi, dan abangan (Denny, 2006: 31).

Ideologi partai politik pemilu tahun 1955 di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Politik Eropa baik komunisme (Partai Komunis Indonesia-PKI), Nasionalisme radikal (Partai Nasional Indonesia-PNI), Sosialisme Demokrat (Partai Sosialis Indonesia-PSI), maupun Pan Islamisme seperti Partai Islam modernis (Masjumi); maupun pengaruh tradisional Jawa dan Islam tradisional (Feith, Castles, 1970: 14). Dalam kasus Indonesia, pola partai-partai politik di rezim Orde Baru memiliki dua model partai catch-all tipologi Kirchheimer atau Hegemonic Party tipologi Sartori (Sartori, 1967:230). Hegemonik partai dalam kasus Golkar di masa Orde Baru lebih diperkuat oleh basis sosial partai melalui

jalur lembaga ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) sebagai tiga kekuatan dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Sementara PDI dan PPP berada pada posisi sebagai partai satelit (Chrisnandi, 2005: 60).

Tipologi partai lainnya di era Reformasi terbagi ke dalam kutub sekuler dan Islam serta kutub elitis dan populis pada pemilu 1999. Golkar sebagai partai yang mendekati tiga kutub elitis dan sekuler; Islam namun menjauhi kutub populis. PDI dianggap partai sekuler yang berada pada wilayah separuh elitis dan separuh populis, namun menjauhi Islam. PKB berada pada posisi lebih populis dan kutub Islam maupun sekuler namun menjauhi kutub elitis. PAN berada pada posisi elitis dan Islam, menjauhi kutub populis dan sekuler. PPP berada pada posisi Islam-populis sedangkan PBB berada pada Islam secara radikal dan sedikit berada pada posisi elitis (Evans, 2003: 34). Berdasarkan akar sejarah dan lahirnya ideologi, partai politik juga dapat dikatakan dengan afiliasi politik masyarakat ke ideologi besar yakni nasionalisme, sosialisme dan agama. Pertama, PDI-P mendekati kutub nasionalisme dan menjauhi sosialisme dan Agama. Golkar lebih kuat berada pada posisi sosialisme dan Agama menjauh dari nasionalisme. PPP berada pada wilayah agama. Sementara PAN berada di antara agama dan sosialisme. PKB berada pada posisi agama, dekat dengan sosialisme dan agak jauh dari nasionalisme (Imawan, 2006: 20).

Dhakidae membagi tipologi partai dibagi dalam empat kutub yang berbeda, yaitu kutub "kelas" (PRD) secara horisontal berlawanan dengan kutub "developmentalism" (Golkar), dan kutub "agama" (PPP, PBB, PK, PDKB dan Krisna) secara vertikal

berseberangan dengan kutub "nasionalisme"(PDI-P). PKB berada pada dua kutub agama dan developmentalisme; PAN berada pada dua kutub agama dan kelas (Dhakidae, 2004 : 5).

Gambaran tipologi partai politik berbasis agama dibedakan dalam empat tipologi partai politik. Pertama, partai berbasis Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi (PUI, PKU, PMB, PPP, PPP, PSII, PSI 1905, PBB, PK, PNU,PP). Kedua, tipe partai yang melakukan obyektivitas, jika (a) mengakui adanya pluralisme dalam masyarakat, (b) menjadikan moral agama sebagai landasan gerakan, (c) berusaha supaya moral agama (kemanusiaan, keadilan, kemajemukan) menjadi kenyataan obyektif, dan (d) menjadikan pancasila sebagai ideologi. Partai-partai tersebut adalah PAN, PIB, KAMI, PAY, PID, SUNI, PUMI, PDR, PCD. Ketiga, partai berdasar spasialisasi memberi ruang tersendiri (*space*) kepada agama dalam urusan kenegaraan, tetapi antara keduanya terpisah secara jelas. Agama hanya urusan personal, bukan urusan publik. Partai-partai tersebut antara lain (PKB, GOLKAR, PARI). Keempat, tipe partai yang sekuler yang melihat tidak relasi antara agama dan urusan negara. Partai- partai tersebut antara lain PDI-P, MURBA dan PRD (Tantowi, 2005: 207-208).

Zenzie menarik sebuah garis kontinum liberal-konservatif, berdasarkan komitmen ideologis. Liberal merepresentasikan pandangan politik yang pluralitas, egalitarian, dan non-sektarian. Sementara konservatif merepresentasikan pandangan yang lebih sektarian, eksklusif, dan secara eksplisit menggunakan asas Islam. Yakni, faksi-faksi yang tumpang tindih dalam masyarakat Indonesia: (1) Muslim nominal, sekularis, dan agama minoritas;

(2) reformasi, urban, modernis dan aktivis Muslim; dan (3) rural dan tradisional Islam (Tantowi, Ibid:208-209).

Dengan demikian, pemetaan Zenzie dapat dijelaskan dengan menarik garis lurus Liberal-konservatif (PDI-P—PKB—GOLKAR—PAN—PPP—PBB). Dari tipologi partai politik tersebut, Indonesia sebenarnya merupakan percampuran ideologi yang saling meresap antara satu entitas ideologi dengan yang lainnya. Partai politik cenderung dapat bergerak, baik ke arah partai berbasis massa, kader maupun *catch-all*. Partai politik tidak sepenuhnya menggunakan satu model basis ideologi karena disebabkan oleh elit yang diserap oleh partai politik tidak hanya menyentuh basis sosial tunggal, melainkan menggunakan perluasan basis konstituen.

### **2.3 Institusionalisasi dan Demokratisasi Intra Partai Politik**

Mainwaring dan Torcal memberikan konsep baku bahwa institusionalisasi partai politik dalam empat dimensi. *Pertama*, sistem yang lebih terlembaga mewujudkan stabilitas yang cukup besar dalam pola persaingan partai. *Kedua*, dalam sistem yang lebih melembaga, partai memiliki akar yang kuat di masyarakat dan sebagian besar pemilih. Ketiga, dalam sistem yang lebih melembaga, aktor politik menyesuaikan legitimasi dengan partai. Dibandingkan dengan sistem partai yang lebih terlembaga, sistem yang cair yang ditandai dengan kurangnya keteraturan dalam pola persaingan partai; akar partai yang lebih lemah di masyarakat; kurang legitimasinya yang diberikan kepada partai; dan organisasi partai yang lemah, sering didominasi oleh para pemimpin personalistik (Katz dan Crotty, 2014: 340).



Gagasan tentang institusionalisasi tidak boleh teleologis, juga prosesnya tidak boleh linear; tidak diperlukan perkembangan dari institusionalisasi yang lemah ke institusionalisasi yang lebih besar. Pemungutan suara berdasarkan karakteristik kepribadian calon, tanpa muatan program atau ideologi, adalah tanda akar partai yang lemah di masyarakat. Dengan ikatan yang kuat antara pemilih dan partai-partai, baik yang dibangun melalui program/efektif, pemilih tetap setia kepada partai mereka, dan arti penting kepribadian calon menjadi nomor dua (Katz dan Crotty, *Ibid.*: 340).

Dalam sistem partai yang cair, personalisme tanpa komponen program dan ideologi memainkan peran lebih besar dalam pemungutan suara. Dalam sistem yang lebih terlembaga, pemilih lebih mungkin untuk melakukan identifikasi dengan partai, dan partai mendominasi pola rekrutmen politik dan musyawarah. Dalam sistem yang cair, banyak pemilih memilih sesuai dengan kepribadian lebih dari partai; politisi anti-partai lebih mampu memenangi jabatan. Populisme dan anti-politik lebih umum. Kepribadian lebih dari organisasi partai mendominasi panggung politik (Katz dan Crotty, *Ibid.*: 354).

Demokratisasi intra partai berkaitan dengan suatu kondisi internal partai yang mampu beraktivitas secara demokratis sebagai bentuk perwujudan partai yang stabil. Pada beberapa kasus tertentu, ditemukan tiga hal penting dalam demokratisasi internal partai yakni keterbukaannya/ inklusivitas, desentralisasi sistem distribusi kekuasaan dan kewenangan partai, dan tingginya partai yang terlembagakan (Scarrow, 2005:6). Penentu tingkat partisipasi dalam kegiatan demokratisasi intra-party biasanya

berkaitan dengan afiliasi akar rumput (Sandri, 2015:211). Demokrasi intra-partai, durasi keanggotaan dan loyalitas pada sebagai faktor yang saling bergantung. Persepsi anggota demokrasi intra-partai dan derajat aktivisme internal anggota partai berkaitan dengan aktivitas demokratisasi intra-partai. Inklusivitas partai juga dapat dilihat dari sisi keterbukaannya dan ketertutupannya (Berge and Poguntke, 2017: 139). Partai dinilai tertutup jika dalam pengambilan keputusan hanya melibatkan segelintir pimpinan atau justru keputusan ditentukan oleh pemimpin tunggal. Dalam kasus seleksi kandidat politik diistilahkan sebagai sesuatu perilaku seleksi yang bias (Dodeigne and Teuber, 2019: 47).

Mengapa harus demokratisasi intra-partai? Demokrasi intra-partai diperlukan untuk meningkatkan pengaruh dan kontribusi warga yang terlibat secara politik dalam sebuah partai. Hal ini dengan model negara demokratis tidak dapat diatur partai dengan struktur yang tidak demokratis. Selain itu Demokrasi intra partai dibutuhkan untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka antara pimpinan partai dengan anggota partai (Hofmeister dan Grabow, 2011:48).

Rahat dan Shapira menyebutkan Mengukur intra partai politik membutuhkan 5 (lima) indeks pengukuran demokrasi intra-partai yaitu partisipasi politik, kompetisi, Representasi, Responsivitas, dan transparansi (Rahat and Shapira, 2016: 84-110). Kriteria model demokrasi intra partai politik yaitu: 1) Promosi partisipasi bagi semua anggota di internal partai; 2) penyampaian aspirasi anggota dalam partai; 3) partisipasi kelompok kaum perempuan, pemuda, dan kelas menengah; 4)

Toleransi perbedaan pendapat dalam batas-batas program partai mendasar; 5) Kepatuhan peraturan, ketentuan, partisipasi keanggotaan, pengambilan keputusan dalam partai; penghormatan pimpinan partai terhadap keanggotaan biasa dalam partai (Hofmeister and Grabow, 2013:50). Garis besarnya dapat disingkat indikator demokrasi intra-partai adalah institusionalisasi, desentralisasi, inklusivitas/ keterbukaan, partisipasi langsung dan tidak langsung (Ashiagbor, 2008: 8-13).

## **2.4 Konsep Faksionalisme Intra-Party**

### **2.4.1 Makna Faksi**

Menelusuri akar faksionalisme membutuhkan penelitian mendalam tentang grand teori dan konsep Faksionalisme. Sartori menyebut Faksi jauh lebih tua dan lebih mapan dari partai politik yang berasal dari bahasa Latin (*untuk melakukan, untuk bertindak*). Faksi dalam dinamika politik diberi makna sebagai “kelompok politik cenderung mengganggu dan berbahaya “*facere*” (perbuatan yang mengerikan). Faksi dimaknai sebagai gagasan tentang keangkuan, perilaku yang berlebihan, kejam, dan dengan demikian berbahaya (Sartori, 1976: 3).

Jika ditinjau dari sisi bahasa, faksionalisme dikenal sebagai fakta (*fact*), kenyataan yang sudah terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Kamus Merriam-Webster (1984:318) menyebutkan “*faction*” adalah Blok/ bloc (kombinasi negara, partai politik, atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama); Partai/*party* (kelompok, pendukung, penyokong); Kombinasi/ *combination* (penggabungan atau penggabungan bagian atau kualitas yang berbeda di mana elemen komponen

berbeda secara individual); lingkaran/*ring*; klik (kelompok, kumpulan, golongan kecil); Set (kumpulan, pasangan, setel, perangkat); *coterie*/pondok (sekelompok kecil orang dengan minat atau selera bersama, dan tertutup bagi orang lain); Arena/gelanggang (*circle*). Definisi ini memiliki hubungan antara faksi dengan partai politik karena pada intinya kelahiran partai politik diawali dari kekuatan faksi yang berkumpul dan berkeinginan membentuknya.

Faksi juga dimaknai sebagai fraksi (pecahan) dari kelompok apa pun yang diorganisir untuk tujuan politik, yang mendefinisikan sendiri setidaknya sebagian oleh penentangannya terhadap beberapa kelompok saingan. Fraksi ini biasanya berada dalam partai politik, Lembaga, Pemerintah, dan diidentifikasi oleh persepsi dengan tujuan umum. Ketika faksi bekerja dalam pencapaian kekuasaan politik memerlukan partai politik. Faksi muncul sebagai antitesa terhadap gejala absolutisme mutlak dan konstitusionalisme yang berlebihan. Faksi dibutuhkan dalam transformasi politik yang berfungsi sebagai kelompok yang mengambil peranan dalam keseimbangan politik (Scrutton, 2007: 238).

Kamus politik menyebut faksi adalah kelompok minoritas pembangkang dalam suatu organisasi yang lebih besar. Faksi dilatarbelakangi oleh ketidaksepakatan internal berupa kebijakan, atau tentang kepribadian dan kepemimpinan (Bealey and Allan, 1999: 128). Bahkan beberapa partai politik lebih dikuasai oleh faksi dalam model kandidat Proporsional Representatif (sistem pemilu) dapat menimbulkan persaingan sesama kandidat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu

Budaya politik juga sangat berpengaruh dalam derajat pecahan. Dalam perkembangan terbentuknya faksi pada abad ke-18, model politik parlementer Inggris dikuasai oleh relasi patronase (Bealey and Allan, *Ibid.*: 128).

Antara partai dan faksi dianggap serupa dalam pengorganisasian politik karena kelompok-kelompok yang berkonflik sering berkompetisi memperebutkan posisi penting. kasus lainnya, model Politik Jepang pada abad ke-20 meskipun diberikan hak pilih universal tetapi penuh dengan faksi, terutama di partai Demokrat Liberal yang berkuasa. Faksi-faksi tersebut terhubung dengan posisi patronase dan hubungan klientilisme dengan para pemilih (Bealey and Allan, *Ibid.*:128).

#### **2.4.2 Akar Sejarah Faksi dan Teorisi Dewasa ini**

Faksi dikaitkan dengan pandangan David Hume tentang faksi politik disusun berdasarkan kepentingan. Hume melihat tiga jenis faksi: disusun sebagai *faksi kepentingan*, *faksi prinsipil*, dan *faksi perorangan* atau atau keluarga. Ia beranggapan bahwa konflik dari faksi prinsipil sangat merusak partai karena tidak ada kompromi. Politik prinsip dapat disetujui apabila seluruhnya sesuai dengan prinsip Bersama (Hardin, 2007: 151).

Salah seorang pemikir Revolusi Perancis (1789–1799), Sieyès menolak diperbolehkannya membeda-bedakan individu atau faksi minoritas yang bermain dalam pemerintahan. Sieyès berpendapat kontrak sosial berfungsi mengatasi seluruh perbedaan kelompok kepentingan karena kekuatan mayoritas telah mengikat. Faksi yang berkuasa tidak berhak memaksakan kehendaknya karena ketika berbeda dalam kepentingannya dengan mayoritas, maka faksi tersebut dipersilahkan

meninggalkan pemerintahan yang dikuasainya. Solusinya mayoritas bisa melakukan pengusiran terhadap faksi minoritas karena tidak mewakili kehendak umum (Dunn, 2002: 19).

Tidak berbeda jauh dengan pikiran Sieyes, Rousseau menilai tentang eksistensi faksi dan partai politik sebagai sesuatu yang paling dikutuk. Rousseau mempertanyakan dengan pembenaran apa yang bisa dialamatkan terhadap kedua lembaga ini yang hanya mewakili kepentingan yang parsial pribadi/individu itu di suatu negara yang menjunjung tinggi kesetaraan, namun mengorbankan kepentingan bersama (Dunn, Ibid. : 20).

Pemikiran faksi politik lainnya diungkapkan oleh Madison yang mendefinisikan faksi sebagai "sejumlah warga negara, baik yang berjumlah mayoritas atau minoritas dari keseluruhan, yang dipersatukan dan digerakkan oleh beberapa dorongan hasrat yang sama, atau kepentingan, yang bertentangan dengan hak-hak warga negara lain, atau permanen. Unsur yang paling mencolok dari definisi ini adalah proposisi bahwa mayoritas warga negara mungkin merupakan faksi, dengan semua perilaku yang buruk dalam faksi politik yang hadir (Shuck, 1996: 553-597).

Sebuah pertanyaan menarik yang diungkapkan oleh Madison, "Bisakah perbedaan dan faksi dihilangkan dari masyarakat?" Dengan menelaah pikiran Rousseau tentang kehendak kontrak sosial dan model keterwakilan mayoritas, Madison menghendaki konsensus sebagai opsi atau alternatif jalan tengah dalam mengatasi perbedaan. Faksi-faksi yang berbeda dapat bersatu dalam pilihan politik. Namun di satu sisi, kebebasan akan melahirkan faksi, dengan kata lain, faksi merupakan buah dari kebebasan yang diinginkan oleh masyarakat (Schuck, Ibid. : 553-597).

Madison menegaskan objektivitas kepentingan publik (kepentingan permanen dan agregat masyarakat) merupakan gabungan dari kepentingan khusus atau dari kombinasi kepentingan yang didominasi kepentingan mayoritas. Berbeda dengan konsep Rousseau bahwa kepentingan publik ini dapat dilihat hanya melalui proses deliberatif dari sebuah republik kecil, terdesentralisasi, homogen, nonkomersial, Madison lebih memaknai tindakan faksi yang berusaha mencari jalan tengah antara konsepsi objektif kaum idealis dan konsepsi proseduralis yang lebih pluralis. Madison memposisikan faksi melalui visi perwakilan dengan mempertimbangkan secara rasional tekanan konstituen, dan praktek musyawarah. Faksi yang digambarkan Madison lebih mendekati model perwakilan yang mengangkat pemerintahan melampaui kepentingan perseorangan (Schuck, *ibid.*:553-597).

Faksi dicirikan oleh model informal, organisasi yang fokus pada pemimpin. Faksi adalah kelompok yang fungsinya tunggal tampaknya mendapatkan akses terhadap sumberdaya fisik dan sosial yang terbatas. Tujuan ini dapat tercapai melalui praktek pragmatisme, mencari keuntungan melalui agen atau aktor. Akhirnya, dalam konteks struktural dan fungsional, faksi adalah kelompok kecil, kelompok etnik, kelompok kekerabatan (Brumfiel and Fox, 1994:3).

Faksi adalah kelompok yang melayani fungsi-fungsi sosial secara positif atau justru menjadi kelompok patologi sosial. Hubungan antara faksi dan konflik kelas, atau faksi sebagai sebuah penyumbatan atau dorongan untuk sosial perubahan. Faksi disebut sebagai kelompok konflik yang berorientasi pada

politik yang keanggotaannya direkrut dan dipelihara melalui upaya pemimpinya. Dalam faksi persatuan berasal dari hubungan antara pemimpin dan pengikut yang longgar dan terstruktur, dengan karakter yang personalistik.

Faksi politik juga dipahami sebagai kelompok individu dalam entitas yang lebih besar, seperti partai politik, serikat pekerja atau kelompok lain, atau yang disatukan oleh tujuan politik yang sama. Faksi dalam partai politik dapat mencakup sub-faksi yang terfragmentasi, sebagai blok kekuatan dan blok suara dimana anggota faksi bersatu demi mencapai tujuan dan memajukan agenda berdasarkan dinamika partai (Brumfiel and Fox, Ibid.:3).

Faksi bisa terbentuk berdasarkan perhitungan kepentingan pribadi, dan bukan komitmen moral terhadap kelompok yang sifatnya sesaat dengan keanggotaannya direkrut di berbagai basis. Kepemimpinan faksi berasal dari latar belakang sosial yang sama agar dapat menekan jarak persaingan sosial. Pemimpin faksi cenderung berasal dari sektor masyarakat yang dominan dengan tujuan agar memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan dalam merekrut basis yang lebih besar. Sebagai hak istimewa yang diperoleh dari kesamaan latar belakang masyarakat, pemimpin faksi cenderung berbagi tujuan politik serupa tanpa bertentangan dengan struktur dasar masyarakat (Brumfiel and Fox, Ibid.: 4).

Di level partai politik, faksi juga muncul sebagai bagian dari perilaku pragmatis dan mencari keuntungan. Sebagai sebuah kelompok kepentingan, dalam partai politik, faksi dimaknai sebagai kelompok terstruktur dalam partai politik yang mencari, atau sekurang-kurangnya mengendalikan posisi pengambilan



keputusan yang otoritatif dari partai. Faksi sebagai kelompok terstruktur yang membentuk pola mapan dalam perilaku dan interaksi untuk anggota faksi sepanjang waktu (Alan, 1979: 20).

Ciri-ciri faksi dalam partai politik terdiri dari kelompok yang diwakili oleh proyeksi ambisi individu yang sangat mirip dengan geng politik, juntos, dan pengelompokan keluarga yang mendominasi politik. Dalam kasus terbentuknya faksi dalam intra partai, interaksi politik para aktor politik secara individu dalam partai seperti legislator, kandidat, pejabat yang ditunjuk dan anggota yang memiliki motivasi memimpin secara beragam sebagai bentuk perilaku bersaing (Sartori, 1976:64).

Faksi sebagai kelompok kepentingan (*vested interested*) dalam partai politik. Thomas mengajukan relasi, fungsi dan entitas faksi dalam partai politik dengan mengajukan empat pertanyaan kunci. (1) Mengapa beberapa kelompok kepentingan memiliki hubungan dengan partai politik sementara yang lain tidak, dan bagi faksi yang melakukannya, jenis hubungan apa yang menentukan dan sejauh mana hubungan itu berlangsung? (2) bentuk-bentuk hubungan saja antara partai politik dengan kelompok kepentingan dalam siklus demokrasi. Hal ini dapat ini dikembangkan menjadi model yang mencakup, seperti ikatan erat partai sosialis dengan kelompok buruh; kurangnya hubungan sebagian besar kelompok dengan partai, dan situasi di mana kelompok dan pihak berkonflik (Thomas, 2001: ix)

Pertanyaan lainnya, berkaitan dengan hubungan partai dengan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi sistem politik, khususnya pembuatan kebijakan dan perwakilan; (4) Apakah ada pola umum di seluruh negara yang menjelaskan hubungan partai dengan kelompok kepentingan dan

konsekuensinya dalam demokrasi liberal. Thomas ingin menemukan suatu fakta baru tentang hubungan kelompok kepentingan dalam demokrasi liberal dengan varian latar belakang dan konteks koneksi kelompok kepentingan dengan partai yang lebih spesifik di berbagai negara (Thomas, *Ibid.*:ix).

Valen menekankan bahwa dalam partai politik tidak ada kekosongan sosial karena sesama anggota memiliki perbedaan besar dalam latar belakang sosial dan kepentingan ekonomi anggota partai. Selain itu, anggota memperoleh standar nilai dan sikap yang berbeda dari berpartisipasi dalam kelompok dan kegiatan sosial di luar partai, dan ini dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap partai. Betapapun kuatnya kesamaan yang menyatukan partai dan membuatnya bekerja, selalu ada perbedaan dalam keanggotaan (Valen, 1959: 183-1999).

Scarrow menekankan makna faksi politik dalam partai dikonotasikan sebagai makna yang negatif yang tidak ramah dengan disiplin intelektual. Sebagaimana akar sejarahnya, partai politik berasal dari Bahasa Latin “partir” (artinya untuk membagi), pada Abad ke 18 di Eropa. Partir diterapkan dalam makna negatif yang secara bergantian digunakan dengan istilah faksi untuk menggambarkan bagian yang berada dalam lingkaran ide-ide atau kepentingan pribadi kepentingan. Pelabelan Partai tidak terbatas kepada dunia politik sekuler, melainkan juga dapat diaplikasikan kepada persaingan faksi agama dan sekte (Katz and Crotty, 2006: 18-19). Contoh nyata aktor faksi adalah semua anggota parlemen yang mewakili partai politik dalam usaha mengejar tujuan awal agar terpilih kembali (Giannetti dan Benoit, 2009: 229). Perkembangan selanjutnya dalam memetakan aktor

faksi lebih luas yaitu berbagai kunci kombinasi, klik, atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu pada waktu tertentu dalam mendukung seorang calon (Zariski, 1960: 27-51).

Perspektif struktural digambarkan Beller dan Belloni dengan membedakan faksi dalam tiga jenis organisasi: (1). klik atau kecenderungan faksi; (2). pribadi atau faksi kelompok klien; dan (3) faksi yang dilembagakan atau diorganisasi (Beller and Belloni, 1976: 531-549). Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Janda dan Huntington menguraikan faksionalisme muncul karena disebabkan oleh enam faktor yaitu kohesi legislatif, ideologi, isu, kepemimpinan, strategi dan taktik, dan pembersihan partai (Boucek, 2009: 455-485).

Sartori mengembangkan empat dimensi tipologi faksionalisme partai politik yaitu (1) organisasi, (2) motivasi, (3) ideologis dan pembelahan partai ideologi kiri-kanan. membuat skema bagaimana seharusnya membedakan faksi dari klik dan kecenderungannya (*Tendency*) ketika diperhadapkan dengan dengan (*Interest/ Principle*) terhadap model pelembagaan faksi intra partai menghasilkan tipologi dua dimensi kelompok intra-partai dengan empat kategori dalam area kuadran terpisah: klien, faksi kepentingan, kecenderungan (*tendency*) dan faksi prinsip. Tipologi ini sebenarnya bertujuan mempermudah memahami konsep dan menggambarkan sifat-sifat faksi (Sartori, *Ibid.*: 455-485).

Level organisasi kelompok intra-partai dapat berkisar dari kelompok yang lemah dan sama sekali tidak terorganisir (kelompok laten) lalu diatur secara informal dengan sangat

terorganisir. Motivasi anggota dalam kelompok dapat berkisar awalnya murni kepentingan pribadi (*self-interested*) berubah menjadi kelompok yang memiliki prinsip (*Faction of Principle*) dengan berbagai kombinasi. Tipologi organisasi dalam faksi tidak memiliki garis tegas yang membagi antara yang kuat dan lemah. Empat jenis klien, kecenderungan (Tendency), faksi kepentingan (*faction of interest*), dan faksi prinsip (Boucek, *Ibid.*: 455-485). Faksi sebagai gejala penyimpangan partisipan, klientelisme dan patronase sebagai gejala endemik tidak lazim tumbuh subur di suatu kelompok negara dan mempengaruhi menurunnya kualitas demokrasi (Duning, Nazareno and Brusco, 2013:22).

Tipologi faksi lainnya diuraikan dalam beberapa tipe. *Pertama*, klientelisme dalam tipologi ini dimaksudkan sebagai jenis organisasi yang sangat bergantung pada hubungan pribadi. Klien yang memiliki struktur piramida yang dibangun dengan hubungan *patron-klien* di sebuah partai politik, *clientel* mengatur hubungan vertikal di antara politisi terpilih dengan pengurus partai. Hubungan ini dalam klik dan tendensi, b) perorangan, faksi kelompok klien dan faksi-faksi yang terlembaga. Faksi bisa berlanjut ke luar dan ke bawah di level pemerintahan dan organisasi partai yang berbeda (Bettcher, 2005: 339–358).

Anggota yang lebih rendah posisinya (*klien*) memberikan suara kepada atasan mereka (*patron*), dan sebagai gantinya mendapat sejumlah insentif yang diinginkannya seperti uang, pekerjaan, dan layanan. Dengan kata lain, anggota yang bergabung dalam klien hanya untuk alasan-alasan khusus mementingkan diri sendiri. Keanggotaan yang terus berlanjut pada klien juga bergantung pada hubungan yang berkelanjutan

dengan pelindung tertentu Akibatnya, klientelisme tidak tertata dengan baik dan menjadi rentan runtuh jika patronnya tidak menghendaki lagi.

*Kedua*, Kecenderungan (Tendensi) dalam tipologi ini melibatkan jumlah sedikit organisasi informal, tapi tidak menyiratkan daya tahan, kohesi, atau disiplin. Politisi mengidentifikasi dengan sebuah kecenderungan karena komitmen terhadap ideologi atau pandangan kebijakan bersama. Dengan kata lain, tipe ini tertarik pada insentif purposif (kolektif). Keanggotaan tidak resmi, cair, bahkan tanpa sadar sering tidak dikenali. Arah aktivitasnya tidak perlu diatur secara vertikal. Keberadaan politisi dapat berkumpul di sekitar pemimpin yang mendukung pandangan tertentu, atau mungkin berkerumun dalam kelompok yang lebih kolejial (Bettcher, Ibid. 339-358).

*Ketiga*, Faksi kepentingan (*Faction of Interest*), seperti klien, difokuskan pada pencarian patronase untuk anggotanya, namun strukturnya tidak sepenuhnya bergantung pada akumulasi hubungan pertukaran individu. Jika tipe Klien kadang-kadang disebut sebagai faksi, namun dalam tipologi "faksi kepentingan" diperuntukkan bagi kelompok yang lebih terorganisir. Keanggotaan beroperasi secara sadar sebagai sebuah kelompok yang mendapatkan hak istimewa dan sumber daya bagi anggotanya. Keanggotaan faksi menentukan keberadaan faksi dan kepemimpinannya. Keanggotaan dan struktur cukup stabil, bahkan diformalkan. Faksi jenis ini menyerupai Faksi yang 'dilembagakan' (*'institutionalized' factions*) yaitu faksi yang terorganisir memiliki peraturan dan prosedur, rapat terjadwal, memiliki kantor sentral (Bettcher, Ibid.: 339–358).

*Keempat*, Faksi prinsip (*faction of principle*) memiliki tingkat pengembangan organisasi yang sama tingginya, namun memiliki motivasi seperti kecenderungan (*tendency*). Daripada mengejar patronase dalam skala kelompok, faksi prinsip lebih mencari barang kolektif (*collective goods*) yang murni dalam bentuk kebijakan atau program ideologis yang dapat diterima anggotanya. Keyakinan anggotanya membentuk basis komitmen terhadap faksi dan memisahkannya dari faksi lainnya. Pengembangan organisasi dari sebuah faksi prinsip adalah lebih ditujukan pada pencapaian tujuan kelompok daripada pada pemeliharaan sebuah struktur yang memenuhi kepentingan anggota. Dengan demikian dapat dipahami bahwa klien (*clientisme*) dan faksi kepentingan (*faction of interest*) didasarkan terutama pada patronase, sementara kecenderungan (*tendency*) dan faksi prinsip (*faction of principle*) didasarkan terutama pada keyakinan kebijakan. Keduanya, baik fraksi kepentingan maupun faksi prinsip lebih kuat berkembang secara organisasi daripada klientelisme atau tendensi (Bettcher, *Ibid.*: 339–358). Singkatnya, faksionalisme dapat dibedakan dalam dua aspek derajat organisatoris maupun perbedaan kutub kepentingan dan prinsip. Faksi yang lemah berada pada dua pola Klientalisme dan Tendensi. Sedangkan faksi solid dapat berbentuk faksi kepentingan dan dan faksi prinsipil. Skema tersebut sangat membantu menjelaskan dinamika faksionalisasi yang tidak dapat dikendalikan akan berakibat pada kehancuran partai politik.

**Tabel. 2.2 Model Aktor, Pengorganisasian dan Motivasi Faksi**

<b>MODEL</b>	<b>AKTOR</b>	<b>PENGORGANISASIAN</b>	<b>MOTIVASI FAKSI</b>
<b>(1) Klientelisme</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyeksi Individu: Geng Politik, Juntos, Pengelompokan Keluarga</li> <li>2. Kelompok Formalistik dalam partai: Legislator, Kandidat, Pejabat, Anggota Partai, Pengurus Partai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan Patron-klien secara Vertikal antara Politisi Terpilih dengan Pengurus Partai</li> <li>2. Anggota Lebih rendah (klien) memberikan dukungan pada atasan (Patron)</li> <li>3. Tidak tertata dengan baik, rentan runtuh ketika patronnya tidak mengendaki lagi</li> <li>4. Lemah dalam pengelolaan Organisasi faksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Insentif dari Patron berupa uang, pekerjaan dan layanan</li> <li>2. Klien yang bergabung demi mementingkan kepentingan diri sendiri</li> <li>3. Didasarkan pada orientasi patronase</li> </ol>
<b>(2) Tendensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyeksi Individu: Geng Politik, Juntos, Pengelompokan Keluarga</li> <li>2. Kelompok Formalistik dalam partai: Legislator,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi informal yang tidak memiliki daya tahan, kohesi dan disiplin</li> <li>2. Keanggotaannya tidak resmi, cair, dan seringkali tanpa sadar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertarik pada insentif Purposive dan Kolektif</li> <li>2. Politisi memiliki kecenderungan bersama</li> </ol>

	Kandidat, Pejabat, Anggota Partai, Pengurus Partai	<p>tidak dikenali</p> <p>3. Arah Aktivasnya tidak perlu diatur secara vertikal</p> <p>4. Lemah dalam organisasi faksi</p>	3. komitmen ideologi dan kebijakan bersama
<b>(3) Kepentingan</b>	<p>1. Proyeksi Individu: Geng Politik, Juntos, Pengelompokan Keluarga</p> <p>2. Kelompok Formalistik dalam partai: Legislator, Kandidat, Pejabat, Anggota Partai, Pengurus Partai</p>	<p>1. Kelompok faksi yang lebih terorganisir</p> <p>2. keanggotaan Faksi menentukan keberadaan faksi dan kepemimpinannya</p> <p>3. Keanggotaan dan struktur lebih stabil dan diformalkan</p> <p>4. menyerupai faksi yang dilembagakan (<i>institutionalized Factions</i>) yang terorganisir memiliki peraturan dan prosedur, rapat terjadwal, memiliki kantor sentral</p>	<p>1. Keanggotaannya beroperasi secara sadar sebagai kelompok dalam yang mendapatkan hak istimewa dan sumber daya</p> <p>2. Klien sebagai syarat dalam pencarian patronase dan keanggotaan namun strukturnya tidak sepenuhnya bergantung pada akumulasi hubungan pertukaran individu</p>



<b>(4) Prinsipil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyeksi Individu: Geng Politik, Juntos, Pengelompokan Keluarga</li> <li>2. Kelompok Formalistik dalam partai: Legislator, Kandidat, Pejabat, Anggota Partai, Pengurus Partai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok faksi yang lebih terorganisir</li> <li>2. Keyakinan anggotanya membentuk basis komitmen terhadap faksi</li> <li>3. Pengembangan organisasi lebih ditujukan pada pencapaian kelompok daripada memelihara struktur yang memenuhi kepentingan anggota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurang tertarik pada mengejar patronase dalam kelompok</li> <li>2. lebih tertarik dalam pencarian barang kolektif yang murni dalam bentuk kebijakan atau program ideologis yang dapat diterima oleh anggota</li> <li>3. Orientasi pada keyakinan Kebijakan.</li> </ol>

Teorisasi mutakhir tentang Faksionalisasi diperkuat oleh Boucek (2012) melalui studi tentang penyebab munculnya konflik antar faksi di internal partai. Hasil penelitian terhadap beberapa partai yang dominan tetapi mengalami kekalahan antara lain Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP), Partai Liberal Kanada, partai Demokrat Kristen (DC) Italia, Partai Konservatif Inggris, Partai Kongres India, Institutional Partai Revolusioner Meksiko dan Partai Kuomintang Taiwan. Penyebab munculnya faksionalisasi dalam empat alasan.

*Pertama*, kesuksesan partai dan persaingan internal. Partai yang sukses dalam pemilu justru menjadi daya tarik bagi politisi yang memiliki keinginan tinggi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, mengklaim kesuksesannya dan menekan sumber daya pendukungnya sendiri. Situasi ini akan mendorong dinamika persaingan yang ketat sehingga mempertajam penguatan berbagai faksi yang memiliki kepentingan yang sama. Kesuksesan suatu partai dalam pemilu akan memberikan motivasi yang sangat besar dalam perebutan posisi internal (Boucek, 2012: 2).

*Kedua*, Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan. Beragamnya sifat heterogenitas partai yang dominan berkuasa akan meningkatkan tekanan konflik terhadap klaim kebijakan ideologis yang pada gilirannya, meningkatkan risiko pembagian ideologis dan perpecahan. Ketika menguatnya salah satu faksi dalam partai politik di tengah tumbuhnya bermacam-macam faksi lainnya akan mendorong perbedaan keinginan, kepentingan dan tujuan. Jika tidak mampu dikelola

dengan baik atas perbedaan tersebut, justru partai akan terancam ke arah perpecahan internal (Boucek, Ibid.: 3).

*Ketiga*, Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir. Berkaitan dengan poin kedua, partai-partai politik yang dominan biasanya dijadikan sebagai tujuan perebutan karir politik. Akibatnya partai yang dominan itu menjadi tujuan utama para pencari kekuasaan dan tipe politisi karir. Meskipun disadari bahwa formasi kekuasaan yang tersedia tidak akan mampu memenuhi naluri pencarian kekuasaan berbagai faksi yang ada dalam partai. Pencari kekuasaan seperti politisi karir memahami situasi terbatasnya jumlah posisi yang diinginkan, namun member daya tarik sebagai partai dominan (Boucek, Ibid.: 3).

*Keempat*, Motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Kesejahteraan partai politik akan mengubah keseimbangan antara tujuan kolektif partai dengan tujuan karir individu. Bahwa para Politisi karir menciptakan risiko loyalitas terbagi dan mengakar dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan dapat mengalahkan kepentingan kolektif partai. Motivasi kesejahteraan mendorong munculnya faksi-faksi. Artinya faksi sebagai sebuah cara politisi partai dalam memperoleh asas manfaat kesejahteraan, meskipun disadari bahwa hal itu akan mengorbankan kebersamaan dan kesatuan nilai dalam partai. Kesejahteraan akan memantik faksi tercerabut dari ciri khas awal sebagai kekuatan yang kolektif berubah ke orientasi individu (Boucek, Ibid.: 3).

Selain keempat faktor munculnya faksionalisasi, dalam konteks Keindonesiaan, ada dua hasil kesimpulan yang dapat

dikemukakan terkait dengan hal yang sama. Dalam konteks Indonesia ditemukan tiga penyebab perpecahan internal partai politik yaitu (1) kegagalan menciptakan kepemimpinan yang baik; (2) ketidakmampuan untuk membangun sistem internal yang adil; (3) keberadaan elite-elite partai yang pragmatis. Selain itu, dalam konteks dinamika partai di Indonesia (Noor, 2015: 22). Temuan lainnya terungkap bahwa ada 6 penyebab munculnya faksi pada partai politik yakni (1) kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai; (2) kompleksitas aspek sosiologis anggota partai (struktur kelas, usia, pendidikan); (3) sistem kepartaian dan sistem pemilu; (4) pengelolaan keuangan partai dan kerja kampanye partai; (5) proses seleksi dan pemilihan internal untuk struktur kepengurusan partai yang tertutup; (6) gaya kepemimpinan elit partai yang otonom dapat menghasilkan dua dampak yaitu mendorong terbentuknya disiplin partai dan mencegah perpecahan partai, dan dapat membuat konflik partai semakin menajam karena elit cenderung menggunakan faksi pendukungnya untuk memperkuat kekuasaan dan kepemimpinan politiknya sendiri (Budiarti, 2017: 261-275).

Akibat yang ditimbulkan terhadap faksionalisasi internal partai ternyata memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung pada rute yang ditempuh serta dinamika politik yang dialami oleh internal partai. Faksionalisme sebagai fenomena multifaset akan bermuara pada 3 Implikasi wajah faksionalisme yang berbeda, yaitu (1) kooperatif, (2) kompetitif dan (3) generatif (Boucek, 2009: 455-485).

*Pertama*, faksionalisme kooperatif ditandai oleh pembentukan partai dan perubahan rezim yang terbangun

berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau konsensus. Selain itu faksi ini berupaya memfasilitasi agregasi kapasitas partai politik sambil menjaga identitas sub kelompok, struktur faksi sebagai instrumen dalam kerjasama intra-partai agar terintegrasi). *Kedua*, faksionalisme kompetitif sebagai perpecahan partai politik kedalam faksi yang saling bertentangan, perselisihan intra-partai, perbedaan pendapat, opini partai yang terpolarisasi maupun sangat terpolarisasi dan terfragmentasi dalam tarikan sentrifugal ke dalam partai. Tarikan sentrifugal ini akan berdampak menguatnya perpecahan dan berpotensi melahirkan partai politik yang baru (Boucek, Ibid.:455-485).

*Ketiga*, Faksionalisme degeneratif. Faksi ini terjadi ketika aktor-aktor lebih memilih memaksimalkan dan mencari keuntungan dalam distribusi patronase. Menguatnya Privatisasi daripada kolektivitas internal partai akan mendorong dan memicu siklus destruktif faksionalisme ke arah disintegrasi partai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persaingan faksi dalam internal partai akan membuka babak baru tentang perpecahan. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif. Perpecahan ternyata menjadi fenomena dari berbagai sisi yang berubah dari waktu ke waktu dan menyebabkan pergeseran pola persaingan antar faksi dan kerjasama pada partai politik (Boucek, Ibid.: 455-485).

Berbagai kondisi dapat mengarah ke perebutan faksi dan transformasi faksionalisme dari proses kerjasama dengan salah satu kompetisi lalu mengalami kemunduran. Fenomena ini pada

partai politik tertentu ditemukan kasus sangat terfragmentasi, dan pada pihak lainnya lebih terkonsentrasi, dan terdesentralisasi. Kunci terbentuknya konflik faksi intrapartai mengerucut pada perebutan kepemimpinan (Boucek, 2009, Ibid.: 455-485).

Akibat yang ditimbulkan dari faksionalisasi dapat melanggar legitimasi dan efisiensi sistem politik yang demokratis. Konsekuensi dari faksionalisme intra-partai, menimbulkan perpecahan partai dan bahkan sebagai fenomena '*patologi politik*'. Faksionalisme juga dapat mengakibatkan keputusan intra-partai pada personil yang tidak berdasarkan pada prestasi dan kemampuan orang-orang yang terlibat tetapi berdasarkan pada afiliasi faksinya (Köllner and Matthias Basedau, 2005: 3). Konflik intra-partai berbasis faksi juga dapat mengaburkan posisi partai sehingga membuat partai lebih sulit bagi keputusan pemilih. Singkatnya, faksi intra-partai dapat merusak atau melemahkan otoritas moral dan integritas pihak individu atau sistem partai secara keseluruhan (Köllner and Basedau, 2005: 13).

Faksionalisasi yang menggerogoti tubuh partai tidak bisa dihindari ketika partai itu dibentuk dari berbagai kekuatan struktur sosial, sistem kepartaian, seleksi internal pengurus dan gaya kepemimpinan partai yang cenderung elitis. Stabilitas internal partai politik sangat bergantung pada derajat demokratisasi intra partai, mendorong faksi-faksi mampu bekerjasama dalam mengatur kepentingan internal maupun sebagai intermediasi kebijakan publik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun konflik dan perpecahan internal partai tidak bisa dihindari ketika pengurus tidak mampu membangun sistem

internal yang adil, bahkan elite partai lebih mengedepankan pencarian keuntungan. Dalam kondisi seperti akan mendorong faksi-faksi bersaing karena tujuan mengejar keuntungan seringkali menjadi pemicu konflik internal.

Jika persaingan itu mampu dikendalikan dengan baik, maka keberlanjutan dan eksistensi partai politik dapat dipertahankan. Dampak positifnya faksi-faksi yang berkompetisi bisa menemukan derajat demokrasi intra-partai ketika menjaga keseimbangan kekuatan internal dan mampu pemulihan kondisi politik ketika persaingan terjadi. Namun partai dapat saja mengalami kemunduran, atau bahkan kehancuran, kekalahan pada pemilu ketika persaingan antar faksi di dalam internal mengalami pergolakan yang tidak mampu dikendalikan.

**Tabel 2.3. Tiga Wajah Faksionalisme Intra Partai**

<b>Wajah partai</b>	<b>Kooperatif</b>	<b>Kompetitif</b>	<b>Degeneratif</b>
Faksionalisasi sebagai Proses	Pembagian di bawah dorongan sentripetal	Pemisahan di bawa kekuatan sentrifugal	Fraksinasi / pembagian yang ekstrem terhadap kepentingan faksi
Proses Faksi	Terpisah	Saling bertentangan	Melayani diri sendiri
Kondisi Keberadaan Faksionalisme	Transisi menuju demokrasi. Pembentukan partai, perpecahan, penggabungan. Penyelarasan ulang sistem partai	Konflik; pertentangan; persaingan antar-partai; polarisasi opini partai; fragmentasi yang merangsang Insentif	Insentif privat. Clientelism. Politik mesin
Fungsi-fungsi faksionalisme	Agregasi kelompok terpisah; perpecahan yang samar; mengartikulasikan bagian-bagian partai terhadap preferensi kelompok dan kepentingan; memfasilitasi konsolidasi partai dan koordinasi elektoral tingkat	Keuntungannya yaitu: Membaurkan konflik secara internal; memfasilitasi sirkulasi elit; memperluas pilihan pemilih; menjembatani kebijakan pemimpin dengan kebijakannya; memberdayakan para	mengejar rente dan pertukaran suara; struktur divisi yang spoil; mendorong perebutan faksi; mengalihkan fokus dari tujuan kolektif partai



	lokal.	pengikut partai. Kekurangannya: meningkatnya Pertumbuhan jumlah faksi; aturan main penolakan faksi; suara partai terfragmentasi	
Hasilnya	Keselarasan intra- partai; Partai terpadu dalam stabilitas identitas sub kelompok dalam partai	Dampak positif: Demokrasi intra-partai; keseimbangan kekuatan internal; perubahan moderat; keberlanjutan partai ; pemulihan politik Kelemahan: pergolakan; koalisi faksi yang tidak stabil; macetnya intra- partai; kebijakan yang menyimpang	Perebutan faksi; ketidakstabilan; keputusan buntu; menyia-nyiakan sumber daya publik; korupsi □ nilai-nilai menghancurkan merek, partai berpotensi Potensi partai putus bubar atau ambruk.

Sumber: Françoise Boucek, 2009, *Rethinking Factionalism Typologies, Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism*, Journal of Party Politics, SAGE Publications, VOL 15. No.4 pp. 455–485

Bahkan koalisi faksi bersifat tidak stabil yang berakibat fatal pada macetnya intra-partai maupun kebijakan publik partai yang menyimpang. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi jika masing-masing faksi yang bertikai kembali mengedepankan nilai-nilai demokrasi intra partai agar memulihkan kondisi partai pada derajat partai yang stabil dan terpadu atas sub kelompok partai.

## 2.5 Indikator Penyebab Faksionalisme Partai

Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung yang dijabarkan melalui indikator atas teorisasi Boucek (2012) bahwa munculnya berbagai faksionalisasi intra-partai disebabkan oleh beberapa faktor dominan yaitu (1) Kesuksesan partai dan persaingan internal; (2) Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan. (3) Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir; (4) Motivasi kesejahteraan dalam dilema kolektivitas partai vs individu (Boucek, 2012: 2, 38).

**Tabel. 2.4 Penjelasan Konsep dan Indikator Tentang Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faksionalisasi Internal Partai Politik**

No.	Faktor Penyebab	Indikator
1	Kesuksesan partai dan persaingan internal.	Partai yang sukses dalam pemilu justru menjadi daya tarik bagi politisi yang memiliki keinginan tinggi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, mengklaim kesuksesannya dan menekan sumber daya pendukungnya sendiri. Situasi ini akan mendorong dinamika persaingan yang ketat sehingga mempertajam penguatan berbagai

		faksi yang memiliki kepentingan yang sama. Kesuksesan suatu partai dalam pemilu akan memberikan motivasi yang sangat besar dalam
2.	Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan	Beragamnya sifat heterogenitas partai yang dominan berkuasa akan meningkatkan tekanan konflik terhadap klaim kebijakan ideologis yang pada gilirannya, meningkatkan risiko pembagian ideologis dan perpecahan. Menguatnya salah satu faksi dalam partai politik di tengah tumbuhnya bermacam-macam faksi lainnya akan mendorong keinginan berbeda, kepentingan dan tujuan. Jika tidak mampu dikelola dengan baik atas perbedaan tersebut, justru partai akan terancam ke arah perpecahan internal.
3.	Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang karir politik	Berkaitan dengan poin kedua, partai-partai politik yang dominan biasanya dijadikan sebagai tujuan perebutan karir politik. Akibatnya partai yang dominan itu menjadi tujuan utama para pencari kekuasaan dan tipe politisi karir. Meskipun disadari bahwa formasi kekuasaan yang tersedia tidak akan mampu memenuhi naluri pencarian kekuasaan berbagai faksi yang ada dalam partai. Pencari kekuasaan seperti politisi karir memahami situasi terbatasnya jumlah posisi yang diinginkan, namun member daya tarik sebagai partai dominan.
4.	Motivasi kesejahteraan dalam dilemma	Kesejahteraan partai politik akan mengubah keseimbangan antara

	kolektivitas partai vs individu	tujuan kolektif partai dengan tujuan karir individu. Bahwa para Politisi karir menciptakan risiko loyalitas terbagi dan mengakar dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan mengalahkan kepentingan kolektif partai. Motivasi kesejahteraan akan mendorong munculnya faksi-faksi. Artinya faksi sebagai sebuah cara politisi partai dalam memperoleh asas-asas manfaat kesejahteraan, meskipun hal itu akan mengorbankan beberapa kebersamaan dan kesatuan nilai dalam partai. Kesejahteraan akan memantik faksi tercerabut dari ciri khas awal sebagai sebuah kekuatan yang kolektif berubah ke orientasi individu.
--	---------------------------------	---

Keempat faktor ini sebenarnya digunakan oleh Boucek dalam mengungkapkan faksionalisme partai politik dominan yang mengalami keruntuhan dan kekalahan di beberapa negara. Apakah teori ini mampu menjawab dan mengungkapkan berbagai dinamika faksionalisme pada partai-partai politik yang tidak dominan di level lokal/daerah? Tentu saja keempat faktor penyebab itu dijadikan sebagai indikator awal dalam mengungkapkan penyebab faksionalisme.

Apakah selamanya kesuksesan akan menggiring partai politik ke arah persaingan internal? Atau justru sebaliknya partai politik yang gagal dalam pemilu justru akan memicu timbulnya faksi-faksi yang bersaing secara ketat meskipun memiliki kepentingan yang berbeda dalam faksi. Demikian pula muncul

pertanyaan baru mengenai heterogenitas sebagai faktor penentu dalam ideologi dan resiko perpecahan. Apakah beragamnya latar belakang ideologi partai akan mengancam keutuhan organisasi kepartaian atau hanya berlaku pada partai-partai politik tertentu yang dipengaruhi oleh manajemen partai yang profesional.

Pada partai politik yang dominan berlaku perilaku pencari kekuasaan yang menunjang karir politik. Namun apakah hal ini berlaku juga pada partai politik yang tidak dominan. Pada partai politik yang tidak dominan itu kurang memiliki formasi kekuasaan yang tersedia. Akibatnya semakin mengancam persaingan antar faksi yang bertikai, meskipun para politisi karir memahami situasi jumlah posisi yang diinginkan namun terbatas jumlahnya. Terakhir, motivasi kesejahteraan dianggap sebagai faktor pemicu perpecahan karena akan mengancam loyalitas terhadap partai. Situasi ini akan memancing politisi yang lebih mementingkan kepentingan individu dalam akumulasi modal, dan pada gilirannya merusak keutuhan kolektivisme partai.

Selain itu, Teori kedua Boucek yang menekankan faksionalisme sebagai fenomena multifaset dalam 3 wajah faksionalisme yang berbeda, yaitu (1) kooperatif, (2) kompetitif dan (3) generatif (Boucek, 2009: 455-485).

**Tabel 2.5 Perbandingan Wajah Faksionalisme Partai dan Indikatornya**

<b>Wajah</b>	<b>Indikator</b>
Kooperatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditandai oleh pembentukan partai dan perubahan rezim yang terbangun berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau konsensus.</li> <li>2. Faksi berupaya memfasilitasi agregasi kapasitas partai politik sambil menjaga identitas sub kelompok</li> <li>3. Struktur faksi sebagai instrumen dalam kerjasama intra-partai agar terintegrasi).</li> </ol>
Kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai perpecahan partai politik kedalam faksi yang saling bertentangan, perselisihan intra-partai, perbedaan pendapat</li> <li>2. opini partai yang terpolarisasi maupun sangat terpolarisasi dan terfragmentasi dalam tarikan sentrifugal ke dalam partai.</li> <li>3. Tarikan sentrifugal ini akan berdampak menguatnya perpecahan dan berpotensi melahirkan partai politik yang baru.</li> </ol>
Degeneratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktor-aktor lebih memilih memaksimalkan dan mencari keuntungan dalam distribusi patronase.</li> <li>2. Menguatnya personalisasi kepemimpinan partai daripada kolektivitas internal partai akan mendorong dan memicu siklus destruktif faksionalisme ke arah disintegrasi partai.</li> <li>3. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persaingan faksi dalam internal partai akan membuka babak baru tentang perpecahan.</li> <li>4. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif.</li> <li>5. Perpecahan ternyata menjadi fenomena dari berbagai sisi yang berubah dari waktu ke waktu dan menyebabkan pergeseran pola persaingan antar faksi dan kerjasama pada partai politik.</li> </ol>

Faksionalisasi internal partai politik sering mengalami dinamika yang berbeda-beda. Faksionalisasi tidak selamanya melahirkan perpecahan internal partai. Artinya, faksionalisasi yang diikuti dengan penguatan demokratisasi internal partai sesama sub partai yang majemuk tentu saja lebih memperkuat soliditas partai meskipun perilaku kompetitif tidak terelakan.

Boucek menyebutkan perpecahan internal partai politik ditandai oleh fenomena persaingan yang buruk maupun degeneratif dengan masing-masing penyebabnya. Dampak negatif dari persaingan antar faksi disebabkan oleh (1) Pergolakan; (2) Koalisi faksi yang tidak stabil; (4) Macetnya Intra-Partai; (5) Kebijakan Publik yang Menyimpang. Persaingan yang berdampak buruk yang teratasi akan menimbulkan kehancuran faksi (degeneratif). Faksi mengalami fase degeneratif karena disebabkan oleh beberapa faktor dominan yaitu (1) Perebutan faksi melahirkan ketidakstabilan; (2) Terhambatnya keputusan Kolektif; (3) Menyia-nyiakan Sumberdaya Publik; (4) korupsi; Klientelisme dan Patronase. (Boucek, *Ibid.*: 455-485).

Perpecahan internal partai dapat dihindari jika dalam persaingannya masing-masing faksi lebih mampu (1) mendorong pengembangan kualitas demokrasi intra-partai; (2) menjaga keseimbangan kekuatan internal; (3) menembuh perubahan yang lebih moderat; (4) menjaga keberlanjutan partai ; (5) dan tetap melakukan pemulihan atau normalisasi politik. Selanjutnya, jika situasi berhasil ditempuh, maka faksionalisasi internal partai lebih bersifat kooperatif dan mampu memberikan beberapa solusi. Faksionalisasi akan tidak menimbulkan dampak buruk, perpecahan internal dan kehancuran partai jika faksi-faksi



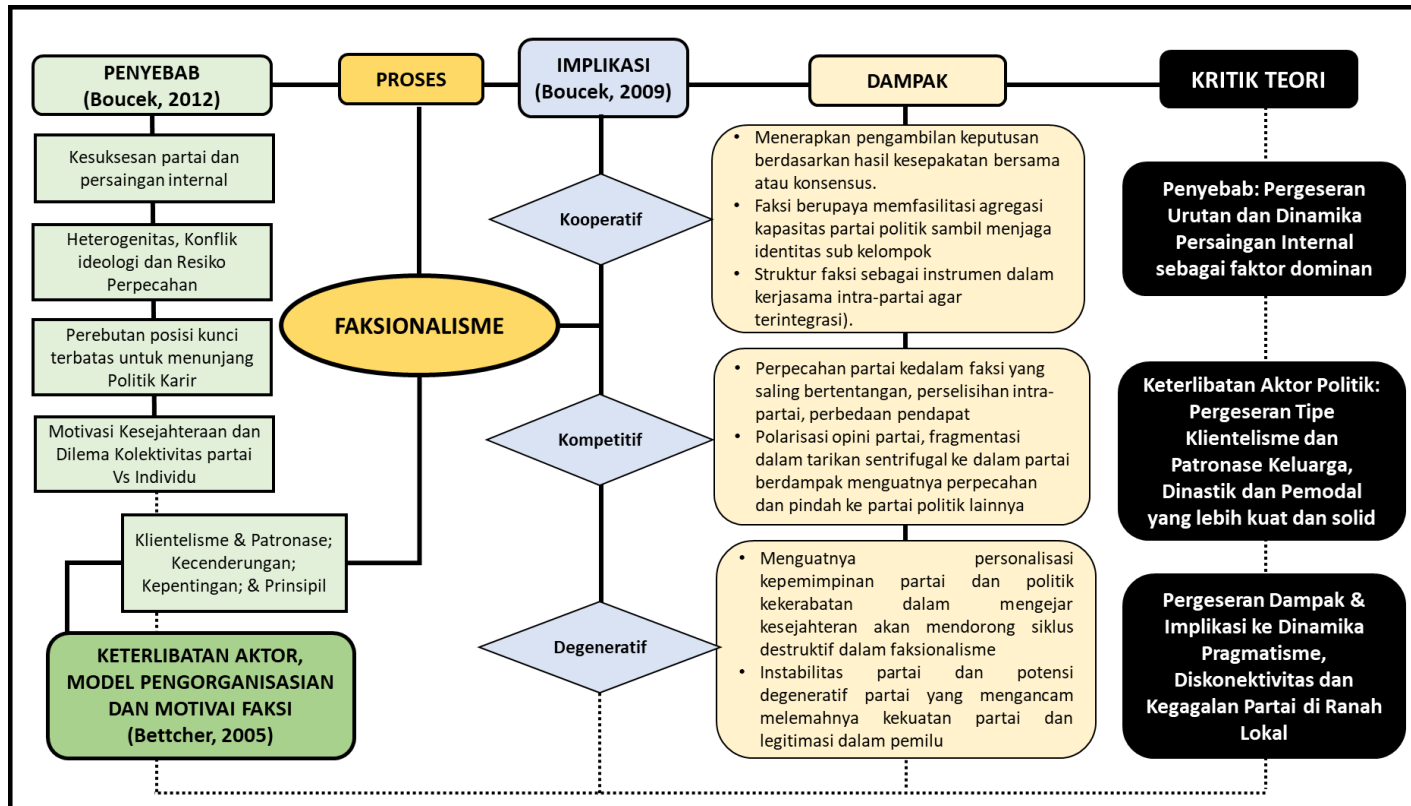
tersebut mampu melakukan (1) strategi menjaga keselarasan dan stabilitas identitas sub kelompok partai; dan (2) demokratisasi Intra Partai (Boucek, Ibid.: 455-485).

Strategi menjaga keselarasan dan Stabilitas identitas kelompok partai dapat dilakukan melalui manajemen internal partai. Menguatnya faksionalisasi seringkali justru memperlemah manajemen intra partai karena masing-masing anggotanya mengartikulasikan berbagai kepentingan dan melahirkan faksi-faksi politik yang berbeda. Seharusnya partai politik harus berusaha untuk menggabungkan beragam hal kepentingan anggotanya dan mengartikulasikan sebuah kepentingan terpadu untuk mencapai tujuannya. Lemahnya penyelesaian konflik partai disebabkan oleh ketiadaan perekat ideologi partai dan ketiadaan internal demokrasi dalam partai (Boucek, 2009, 455-485).

Sebuah partai politik dapat dinilai telah menerapkan Manajemen internal partai jika diselenggarakan secara demokratis, yaitu antara lain: a) memiliki referensi yang jelas mengenai prinsip demokrasi dalam undang-undang kepartaian dan pemilu; b) menghormati prinsip-prinsip internal organisasi dan internal disiplin partai; c) praktek kebebasan berpikir; d) kolegialitas, inisiatif pribadi dan tindakan sendiri; e) transparansi pengambilan keputusan di semua tingkat; f) persaingan nilai dan sistem meritokrasi; g) tingkat sentralisasi/desentralisasi yang jelas dalam pembuatan keputusan; h) bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dan tanggung jawab terhadap basis serta populasi yang lebih luas; i) tersedianya pelaksanaan pengaduan internal prosedur, dan lain-lain. Mengatasi perpecahan internal partai politik, memerlukan strategi demokratisasi Intra Partai

yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu (1) partai harus menerapkan proses seleksi kandidat berdasarkan prinsip-prinsip yang prosedural dan kemampuannya; (2) pemilihan pimpinan partai lebih terbuka (inklusif); (3) setting Kebijakan partai yang lebih terbuka (Krasniqi and Hackaj, pp. 19).

Gambar 2.1 Model Teoritis yang Dikritisi



Gambar 2.1 tentang Model Teoritik di atas menggambarkan beberapa teori yang dikritisi dalam penelitian ini. Penjelasan 3 (Tiga) Teori faksionalisme Partai Politik dapat dijelaskan berurutan. *Pertama*, Penyebab Faksionalisme partai politik (Boucek, 2012) disebabkan oleh 4 indikator yaitu: 1. Kesuksesan partai dan persaingan internal; 2. Heterogenitas, Konflik ideologi dan Resiko Perpecahan; 3. Perebutan posisi kunci terbatas untuk menunjang Politik Karir; dan 4. Motivasi Kesejahteraan dan Dilema Kolektivitas partai Vs Individu. Penelitian ini menguraikan faksionalisme PAN, PKS dan PPP di Maluku Utara dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019). Dampak faksionalisme partai yang ditimbulkannya dapat diklasifikasikan dalam 3 rute.

*Pertama*, Kooperatif. Dampaknya yang dialami partai antara lain: (1) berdampak terhadap pengambilan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau konsensus; (2) faksi berupaya memfasilitasi agregasi kapasitas partai politik sambil menjaga identitas sub kelompok; (3) Struktur faksi sebagai instrumen dalam kerjasama intra-partai agar terintegrasi). Kedua, Kompetitif yang ditandai dua bentuk dampaknya yaitu (1) Perpecahan partai kedalam faksi yang saling bertentangan, perselisihan intra-partai, perbedaan pendapat; dan (2) Polarisasi opini partai, fragmentasi dalam tarikan sentrifugal ke dalam partai berdampak menguatnya perpecahan dan pindah ke partai politik lainnya. Ketiga, rute Degeratif yang ditandai oleh (1) Menguatnya personalisasi kepemimpinan partai dan politik kekerabatan dalam mengejar kesejahteraan akan mendorong siklus destruktif dalam faksionalisme; (2) Instabilitas partai dan potensi degeneratif partai yang mengancam melemahnya

kekuatan partai dan legitimasi dalam pemilu. Partai politik yang mengalami dampak buruk faksionalisme dapat melakukan pemulihan kondisi internal dengan menempuh dua langkah konstruktif. *Pertama*, Manajemen Intra-Partai. langkah ini ditempuh dengan konsisten terhadap rujukan Undang-undang Partai politik dan Pemilu; Prinsip Internal dan Organisasi dan Disiplin Internal Partai; Keseimbangan, Kolegialitas dan kebebasan individu, dan Transparansi dalam Decision Making yaitu manajemen intra-partai dan demokrasi intra-partai. Kedua, Demokrasi intra-partai yang ditandai oleh pola Seleksi Kandidat berdasarkan prosedural dan kemampuannya; Pemilihan pimpinan partai lebih terbuka; dan, Setting kebijakan partai yang lebih terbuka.

Penelitian ini melakukan Kritik terhadap beberapa indikator atas teori faksionalisme berdasarkan temuan baru (novelty). Kebaruan ini menunjukkan bahwa perlu ada kritik dan perbaikan atas teori sebelumnya. Rekonstruksi teori terhadap faksionalisme partai politik butuh beberapa klasifikasi tipologi maupun besar kecilnya kapasitas partai di level lokal. Kritikan dan perbaikan teori berdasarkan beberapa indikator faksionalisme Boucek yang tidak sesuai dan linear dengan dinamika partai politik kecil dan menengah PAN, PKS dan PPP di Maluku Utara sebagai salah satu sampel wilayah di Indonesia.

Kritikan teori ini bertujuan untuk menemukan varian baru tentang indikator faksionalisme antara partai politik yang sukses dan gagal dalam pemilu maupun dalam dinamika kepartaian lainnya. Indikator Boucek menyebutkan semakin sukses partai politik maka semakin tinggi tingkat persaingan dalam internal

partai. Tetapi tingginya tingkat persaingan partai politik justru dapat disebabkan juga oleh kegagalan partai dalam pemilu. Sisi lainnya, terjadi pergeseran urutan dalam penyebab awal terjadinya faksionalisme hingga faktor yang paling dominan dari keempat faktor penyebab faksionalisme. Kritikan teori juga berlaku terhadap berubahnya urutan pengorganisasian dan motivasi aktor faksi (Bettcher, 2005) yang didominasi faksi klientelisme, patronase dan kepentingan pada tipe aktor keluarga, dinastik dan pemodal yang dilatarbelakangi oleh dukungan etnis yang dominan di Maluku Utara.

Terakhir, kritik terhadap dampak dan implikasi menggambarkan pola pragmatisme seluruh faksi. Dampaknya terhadap partai politik yang paling dominan adalah perpecahan internal, dualisme kepemimpinan partai, merosotnya dukungan umat Islam atas partai Islam dan berimplikasi pada gagalnya partai dalam pemilu dan 2019 dan Pilgub. Selain itu, fenomena baru tentang menguatnya politik etnis di internal partai dimotori oleh faksi yang bertindak pragmatis, munculnya diskonektivitas vertikal antara partai Islam dengan konstituennya di Maluku Utara.